

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi di sektor publik, terutama di Indonesia berkembang pesat karena adanya reformasi pemerintah, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal yang fokus pada pemerintah daerah. Selain itu, globalisasi yang kuat memaksa setiap negara dan pemerintah daerah untuk bersaing, dan persaingan ini bisa dicapai dengan meningkatkan kemandirian pemerintah (Hamsinar, 2022).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang berfungsi sebagai entitas pemerintah daerah yang memegang peran krusial dalam pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Kota Kupang. Tanggungjawab ini mencakup proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, administrasi, serta penyusunan laporan keuangan daerah. Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ini sangat penting, karena laporan keuangan yang dihasilkannya berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya publik.

Laporan keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003). Selain bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan juga digunakan untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan sehingga informasi

dalam laporan keuangan harus dilaporkan secara akuntabilitas dan transparan. Untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, maka proses penyusunan dan pelaporan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang berkepentingan (Bastian, 2017). Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakaian dalam pengambilan keputusan, terbebas dari kesalahan informasi material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Amriani, 2018). Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan yang sehat, tetapi juga mendukung prinsi-prinsip *good governance*, seperti, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan standar akuntansi. Setelah BPK melakukan pemeriksaan, BPK mengeluarkan hasil pemeriksaan berupa opini. Opini

merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajiban kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tanpa Memberi Pendapat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah mengartikulasikan bahwa terdapat hubungan agensi temporal antara masyarakat selaku principal dan kepala daerah selaku agent, dimana kepala daerah memperoleh mandat melalui pemilihan oleh publik. Prosedur elektoral ini esensial dalam implementasi pemberian otoritas eksekutif dan delegasi kekuasaan dari publik kepada entitas pemerintah daerah. Lebih lanjut, entitas pemerintah daerah juga menerima delegasi kekuasaan terkait manajemen sumber daya inheren di dalam wilayah yurisdiksinya.

Sebagai agen yang bertanggung jawab atas mandat yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini disajikan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah menjalani audit independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Agustina, 2019). Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bertindak sebagai perwujudan aspirasi konstituennya yang berfungsi sebagai prinsipal, memikul tanggung jawab esensial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap administrasi publik di tingkat regional.

Dalam penyajian laporan keuangan, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dipublikasikan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan pada periode sebelumnya maupun dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Bastian, 2017).

Dalam laporan keuangan didukung oleh beberapa faktor yaitu transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal (Widwiasih, 2020). Menurut Rusdiana (2018), transparansi adalah tindakan memberikan informasi keuangan yang benar dan terbuka kepada masyarakat, berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan komprehensif bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang disediakannya.

Faktor berikutnya adalah akuntabilitas, menurut Zubaidah & Nugraeni (2023), akuntabilitas merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan

kewajiban seseorang untuk bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Akuntabilitas membutuhkan transparansi, kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, sehingga hasil yang dicapai dapat diukur dan dievaluasi. Akuntabilitas sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan hasil pengelolaan keuangan dan melaporkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuannya.

Faktor selanjutnya adalah sistem pengendalian internal, menurut Hery (2016), sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan atau prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan, penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan sesuai dengan peraturan undang-undang, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tanggungjawab strategis dalam mengelola laporan keuangan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, Pemerintah Kota Kupang harus mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif oleh pemerintah daerah serta menjadi bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat.

Tabel 1. 1
Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Kupang

Entitas Pemerintah Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Kupang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <https://ntt.bpk.go.id#>

Berdasarkan tabel 1.1 yang disajikan, terlihat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua aspek material. Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode yang sama justru mengidentifikasi adanya kelemahan, yakni kurangnya transparan dalam pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan klasifikasi pengeluaran dan persyaratan pelaporan. Selain itu, implementasi penganggaran yang kurang optimal menunjukkan akuntabilitas yang kurang ketat. Selanjutnya, terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset, kas, dan pendapatan teridentifikasi dalam sistem pengendalian internal, yang mengakibatkan kesalahan dalam penyajian data (BPK, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang belum sepenuhnya optimal dan memerlukan perbaikan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi penelitian terkait hubungan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian Khikmah (2024), mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil temuan penelitian oleh Monika (2023), menunjukkan secara parsial bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Temuan penelitian Hamsinar (2022), mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik (Wicaksono, 2020).

Penelitian tentang akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan masih terdapat inkonsistensi penelitian. Temuan penelitian Liu (2020), bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini memiliki konsekuensi nyata bagi pemerintah daerah. Temuan penelitian Zubaidah & Nugraeni (2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian Kurniawati (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian tentang sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan masih terdapat inkonsistensi penelitian. Temuan penelitian Monika (2023), mengungkapkan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil temuan penelitian oleh Khikmah (2024), hasil penelitian menunjukkan secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian Mulyati (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang (Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang)”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi responden tentang transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan pada BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang?
5. Apakah transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi responden tentang transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan pada BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang.
5. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Pemerintah Daerah Kota Kupang.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat praktis dan teoritis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak - pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis ataupun ingin mengetahui dan menambah faktor - faktor yang mempengaruhi transparansi, akuntabilitas,

dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota kupang.

2. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan utama bagi para pengambil keputusan di BKAD Kota Kupang dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat, transparan, dan akuntabel.